



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1737, 2018

KEMENKEU. BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 179/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU BERAU

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor KU.002/13/2 PHB 2018 tanggal 27 Maret 2018 hal Usulan Tarif Layanan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU BERAU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang

diberikan oleh Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika; dan
- b. tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa nonaeronautika.

Pasal 3

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
- b. tarif jasa pendaratan pesawat udara;
- c. tarif jasa penempatan pesawat udara;
- d. tarif pemakaian garbarata (aviobridge);
- e. tarif pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter);
- f. tarif pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U); dan
- g. tarif pelayanan jasa kebandarudaraan dalam kondisi tertentu.

Pasal 4

Tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa nonaeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan;
- b. tarif penggunaan gedung dan ruangan;
- c. tarif media promosi;
- d. tarif penggunaan peralatan, kendaraan, dan mesin;
- e. tarif penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara; dan
- f. tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas.

Pasal 5

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa nonaeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan gedung dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif media promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari penggunaan fasilitas, peralatan, lokasi, dan/atau biaya operasional.

Pasal 9

Tarif penggunaan peralatan, kendaraan, dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari fasilitas, peralatan, dan/atau biaya operasional.

Pasal 10

Tarif penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari peralatan, fasilitas, biaya operasional, nilai ekonomis

dan/atau manfaatnya.

Pasal 11

Tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan layanan di bidang jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika dan jasa terkait bandar udara atau jasa nonaeronautika berdasarkan kebutuhan dari pihak lain melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas layanan di bidang jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika dan jasa terkait bandar udara atau jasa nonaeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika dan jasa terkait bandar udara atau jasa nonaeronautika.
- (2) Besaran tarif kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen untuk pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa

aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Besaran tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif dasar dalam perhitungan tarif kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen atas pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika.
- (4) Kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen atas pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika berupa pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f termasuk besaran tarif layanannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif atas layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap kegiatan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atas tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa nonaeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu; dan/atau
 - c. kegiatan pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan.

- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan dengan pihak mitra sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 179/PMK.05/2018
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT
 PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU BERAU
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN ATAU JASA AERONAUTIKA
 BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
 KALIMARAU BERAU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) Penerbangan Dalam Negeri (Domestik)	per penumpang	Rp. 57.000,00
2.	Jasa Pendaratan Pesawat Udara Penerbangan Dalam Negeri (Domestik)		
	a. Bobot pesawat s.d 40.000 kg	tiap 1.000 kg atau bagiannya	Rp. 4.000,00
	b. Bobot pesawat di atas 40.000 kg s.d 100.000 kg	tiap 1.000 kg atau bagiannya	Rp. 140.000,00 + Rp. 5.000,00 tiap 1.000 kg atau bagiannya
	c. Bobot pesawat di atas 100.000 kg	tiap 1.000 kg atau bagiannya	Rp. 420.000,00 + Rp. 6.000,00 tiap 1.000 kg atau bagiannya
3.	Jasa Penempatan Pesawat Udara Penerbangan Dalam Negeri (Domestik)	per jam per ton	Rp. 500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
4.	Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>) Penerbangan Dalam Negeri (Domestik)	per jam	Rp. 260.000,00
5.	Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (<i>Check-in Counter</i>) Penerbangan Dalam Negeri (Domestik)	per penumpang	Rp. 1.600,00
6.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Penerbangan Dalam Negeri (Domestik)	per kg	Rp. 50,00
7.	Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dalam Kondisi Tertentu		
	a. Jasa Penggunaan Bandar Udara untuk Pesawat Udara di luar Jam Operasi	per sekali lepas landas dan/ atau pendaratan	Tarif jasa pendaratan pesawat udara x jumlah jam penggunaan bandar udara di luar jam operasi (tarif minimum Rp394.000,00)
	b. Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (<i>Standby Alternate Aerodrome</i>) di luar Jam Operasi	per sekali lintas sesuai dengan jenis penerbangan dan bobot pesawat udara	33% x tarif jasa pendaratan pesawat udara

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI